



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/17/M.RB.06/2022
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Tahun 2021

7 Maret 2022

**YTH. BAPAK SEKRETARIS JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DI
JAKARTA**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Setjen MPR RI). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Setjen MPR RI.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Setjen MPR RI tahun 2021 adalah **72,53** dengan kategori "**BB**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	16,61	16,74
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,60	5,29
	III. Reform	30,00	18,44	19,32
	Total Komponen Pengungkit	60,00	40,65	41,35

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,37	7,45
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,83	8,41
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,18	8,25
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,04	7,07
Total Komponen Hasil		40,00	31,41	31,18
Indeks Reformasi Birokrasi (Pungungkit + Hasil)		100,00	72,06	72,53

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Setjen MPR RI telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform, meskipun terdapat penurunan hasil antara pada area perubahan dan komponen hasil.

2. Hasil antara area perubahan pada Setjen MPR RI, sebanyak 10 hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	268,00	Komisi Aparatur Sipil Negara
2.	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	2,48	Kementerian Keuangan
3.	ASN Profesional	0-100	40,82	Badan Kepegawaian Negara
4.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	2,06	Kementerian PANRB
5.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	23,69	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
6.	Kualitas Pengelolaan Anggaran	0-100	93,04	Kementerian Keuangan
7.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	3,01	Kementerian PANRB
8.	Kapabilitas APIP	0-5	2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
9.	Maturitas SPIP	0-5	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
10.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	71,49	Arsip Nasional Republik Indonesia

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa penilaian hasil antara yang baru dilakukan pengukuran pada tahun 2021. Meskipun demikian, pada sebagian hasil antara terdapat penurunan kualitas, yaitu kualitas pengelolaan anggaran dan kualitas pengelolaan arsip. Hal tersebut menyebabkan secara keseluruhan hasil antara Setjen MPR RI pada tahun 2021 mengalami penurunan. Untuk hasil antara yang tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2021, maka menggunakan data tahun sebelumnya jika tersedia.

3. Setjen MPR RI telah melakukan tindak lanjut rekomendasi yang telah kami sampaikan pada tahun sebelumnya, diantaranya yaitu:
 - a. Roadmap Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI 2020-2024 telah diformalkan dalam Peraturan Setjen MPR Nomor 5 Tahun 2020 dan telah dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kerja unit kerja sehingga dapat membantu pelaksanaan reformasi birokrasi di level unit kerja;
 - b. Peta proses bisnis terbaru telah disusun dalam Surat Keputusan (SK) Sesjen MPR Nomor 39B Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal MPR RI. Peta proses bisnis ini disusun sesuai dengan SOTK terbaru yang tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal MPR RI;
 - c. Mempercepat pelaksanaan sistem merit sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditandai dengan meningkatnya hasil penilaian sistem merit dibandingkan dengan tahun lalu;
 - d. Mendorong perbaikan layanan publik dengan membangun berbagai sistem berbasis teknologi informasi, salah satunya yaitu aplikasi *E-Aspirasi Konstitusi*, yaitu sistem informasi yang menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Selain tindak lanjut tersebut, Setjen MPR RI juga telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi serta tindak lanjut atas rencana kerja Reformasi Birokrasi yang telah disusun belum optimal, sehingga dampak dari perubahan yang ada pada unit kerja belum dapat dirasakan secara maksimal;
 - b. Peran agen perubahan belum optimal dalam memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan budaya kerja dan perubahan *mind set* di lingkungan Setjen MPR RI;
 - c. Informasi yang tersedia di dalam JDIH masih perlu ditingkatkan untuk dapat menyediakan informasi kebijakan terbaru yang sesuai dengan kebutuhan publik atau *stakeholder*;
 - d. Setjen MPR RI telah mengajukan usulan pengalihan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi. Berdasarkan usulan tersebut Setjen MPR RI masih diminta untuk melaksanakan pemetaan kembali secara lebih komprehensif terhadap jabatan administrator dan pengawas yang berpotensi dialihkan ke dalam jabatan fungsional;
 - e. Telah berupaya untuk meningkatkan tata kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pembangunan arsitektur SPBE, namun penerapannya belum maksimal. Hal tersebut tergambar pada hasil pengukuran Indeks SPBE Setjen MPR RI tahun 2021 sebesar 2,06 pada kategori "Cukup";
 - f. Belum diterapkan Manajemen Aparatur Sipil Negara khususnya penerapan Manajemen Talenta ASN;

- e. Implementasi kebijakan pengawasan pada tingkat unit kerja belum maksimal. Hal ini tergambar dari manajemen risiko yang ada di lingkungan unit kerja belum teridentifikasi secara menyeluruh serta belum terlihat adanya penerapan dari kebijakan *Whistle Blowing System* dan Pengaduan Masyarakat pada level unit kerja;
 - f. Setjen MPR RI sudah melakukan pencanangan Zona Integritas, namun belum ada unit kerja percontohan yang diajukan untuk memperoleh predikat ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2021.
5. Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Setjen MPR RI memperoleh nilai yang cukup baik dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	63,56	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	84,07	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	82,45	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5	Survei Internal Organisasi	0-100	75,41	SPI Internal oleh KPK

Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Setjen MPR RI, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi secara berkala atas rencana kerja Reformasi Birokrasi baik di tingkat pusat maupun unit kerja, serta memastikan bahwa unit kerja menindaklanjuti saran perbaikan yang ada secara menyeluruh, sehingga perubahan yang terjadi semakin dapat dirasakan;
2. Meningkatkan peran seluruh agen perubahan di setiap unit kerja untuk tidak hanya bertugas mempromosikan perubahan di lingkungannya, namun juga mampu mendorong perubahan sesuai kebutuhan di unit kerjanya dan membangun *social control* di antara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas, serta mengoptimalkan *monitoring* dan evaluasi atas kinerja seluruh agen perubahan;

3. Meningkatkan kualitas JDIH yang telah dibangun sehingga memuat informasi kebijakan terbaru yang sesuai dengan kebutuhan publik atau *stakeholder*;
4. Melaksanakan pemetaan kembali secara lebih komprehensif terhadap Jabatan Administrasi yang berpotensi dialihkan ke dalam Jabatan Fungsional sebagai bentuk tindak lanjut atas penerapan kebijakan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
5. Melakukan optimalisasi penerapan SPBE yang terintegrasi, baik untuk mendukung proses manajemen internal maupun memberikan kemudahan pelayanan kepada *stakeholders*. Selanjutnya, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat efektivitas dan dampak penerapan SPBE tersebut;
6. Mengimplementasikan manajemen talenta sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN;
7. Memperkuat implementasi kebijakan pengawasan internal baik di level pusat maupun unit kerja. Serta memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan mendorong setiap unit kerja mampu mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja;
8. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas terutama pada unit kerja yang merupakan layanan utama, sebagai upaya percepatan penerapan reformasi birokrasi dengan memperhatikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Setjen MPR RI dan *stakeholder* yang dilayani;
9. Meningkatkan mutu *self-assessment* atas aspek-aspek hasil antara pada area perubahan, serta koordinasi dengan *leading sector* yang bersangkutan agar dapat meningkatkan kualitas indeks-indeks hasil antara tersebut.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**
TJAHJO KUMOLO